

PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBANGUN BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS DI KALANGAN MAHASISWA

Serlin Fitriana¹, Naysya Desky², Novita Sary Hasibuan³, Sapta Kesuma⁴, Muharri⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP

Universitas Islam Sumatera Utara

¹fitrianaserlin@gmail.com, ²naysya764@gmail.com,

³Novitasaryhasibuan1995@gmail.com, ⁴sapta.kesuma@fkip.uisu.ac.id,

⁵muharri@fkip.uisu.ac.id

ABSTRACT

Corruption is one of the fundamental problems that hinder democratic development in Indonesia. This study aims to examine the role of anti-corruption education in building a democratic political culture among university students. Using a descriptive qualitative approach and literature study, this research analyzes how the internalization of anti-corruption values such as honesty, integrity, responsibility, and transparency can encourage the formation of democratic student character. The results show that anti-corruption education significantly contributes to shaping students' political awareness, increasing democratic participation, and strengthening commitment to good governance values. The implementation of anti-corruption education through formal curricula, extracurricular activities, and campus culture has proven effective in transforming students into agents of change with integrity.

Keywords: Anti-corruption education, democratic political culture, university students, political participation, integrity.

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang menghambat pembangunan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan anti korupsi dalam membangun budaya politik demokratis di kalangan mahasiswa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, penelitian ini menganalisis bagaimana internalisasi nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan transparansi dapat mendorong terbentuknya karakter mahasiswa yang demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi secara signifikan berkontribusi dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa, meningkatkan partisipasi demokratis, dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai good governance. Implementasi pendidikan anti korupsi melalui kurikulum formal, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya kampus terbukti efektif dalam mentransformasi mahasiswa menjadi agen perubahan yang berintegritas.

Kata Kunci: Pendidikan anti korupsi, budaya politik demokratis, mahasiswa, partisipasi politik, integritas.

A. Pendahuluan

Korupsi telah menjadi salah satu persoalan serius yang merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada angka yang memprihatinkan, yang menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya berhasil. Kondisi ini mendorong berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan tinggi, untuk mengambil peran aktif dalam memerangi budaya korupsi yang telah mengakar kuat dalam tatanan sosial-politik Indonesia.

Pendidikan anti korupsi muncul sebagai salah satu instrumen strategis dalam upaya jangka panjang untuk membangun generasi yang bersih, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Koentjaraningrat menyatakan bahwa budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dengan demikian, transformasi budaya koruptif menuju budaya anti korupsi

hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan calon pemimpin bangsa memegang peranan krusial dalam proses demokratisasi Indonesia. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan kognitif, tetapi juga sebagai pembentuk karakter demokratis mahasiswa yang akan menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang bersih di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Menurut Moleong, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa dokumen-dokumen resmi KPK, kebijakan pendidikan anti korupsi nasional, dan regulasi terkait, serta sumber sekunder berupa buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 1016/E/T/2012, seluruh perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum akademik. Implementasi ini dapat dilakukan melalui tiga model: (1) mata kuliah tersendiri, (2) disisipkan ke dalam mata kuliah yang relevan, atau (3) melalui ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler.

Menurut Suyatno, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi harus

dirancang secara komprehensif yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan tindakan (*action*). Pendekatan yang efektif adalah pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam berbagai disiplin ilmu, bukan hanya sebagai mata kuliah tersendiri.

2. Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Konteks Demokratis

KPK mengidentifikasi sembilan nilai utama anti korupsi yang harus diinternalisasikan melalui pendidikan, yaitu: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai ini memiliki relevansi langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana berikut:

Pertama, nilai kejujuran dan transparansi merupakan fondasi utama demokrasi. Amartya Sen menegaskan bahwa demokrasi yang sesungguhnya membutuhkan kebebasan informasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Mahasiswa yang terbiasa dengan budaya jujur akan lebih kritis terhadap praktik-praktik koruptif dalam kehidupan bernegara.

Kedua, nilai tanggung jawab dan akuntabilitas berkaitan erat

dengan prinsip check and balances dalam sistem demokrasi. Pemahaman mahasiswa tentang akuntabilitas publik akan mendorong mereka untuk berperan aktif sebagai pengawas sosial (*social control*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, nilai keberanian untuk melaporkan praktik korupsi merupakan cerminan dari budaya demokrasi yang sehat. Mahasiswa yang memiliki keberanian sipil (*civic courage*) akan turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem demokrasi melalui partisipasi aktif dalam mekanisme pengawasan sosial.

3. Strategi Membangun Budaya Politik Demokratis melalui Pendidikan Anti Korupsi

Paulo Freire menekankan pentingnya pendidikan kritis (*critical pedagogy*) yang membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan ketergantungan. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, pendekatan kritis Freire menekankan bahwa mahasiswa tidak hanya harus memahami korupsi secara teoritis, tetapi juga harus mampu menganalisis akar struktural korupsi dalam sistem politik dan ekonomi.

Budimansyah dan Suryadi mengemukakan bahwa strategi efektif pendidikan kewarganegaraan demokratis di perguruan tinggi mencakup tiga komponen: (1) pendidikan formal melalui kurikulum; (2) pendidikan informal melalui budaya kampus; dan (3) pendidikan non-formal melalui keterlibatan masyarakat. Kerangka ini dapat diadaptasi untuk pendidikan anti korupsi dengan memastikan konsistensi nilai di seluruh ekosistem kampus.

Di tingkat praktis, beberapa strategi yang telah terbukti efektif antara lain: penerapan sistem integritas akademik (*academic integrity*) yang tegas, pembentukan unit kegiatan mahasiswa (UKM) anti korupsi, penguatan peran ombudsman kampus, serta penyelenggaraan kompetisi dan festival anti korupsi yang melibatkan mahasiswa secara aktif.

4. Korelasi Pendidikan Anti Korupsi dan Partisipasi Politik

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyada menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pemahaman anti korupsi mahasiswa dengan tingkat partisipasi politik mereka. Mahasiswa yang

mendapatkan pendidikan anti korupsi yang komprehensif cenderung lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan demokrasi kampus, lebih kritis terhadap kebijakan publik, dan lebih memiliki komitmen untuk terlibat dalam proses politik secara konstruktif.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Dahl yang menyatakan bahwa demokrasi yang berkualitas membutuhkan warga negara yang terdidik, terinformasi, dan berpartisipasi aktif. Pendidikan anti korupsi berkontribusi dalam memenuhi ketiga prasyarat ini dengan membentuk mahasiswa yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga termotivasi untuk menjadi bagian dari solusi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun budaya politik demokratis di kalangan mahasiswa. Melalui internalisasi nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan keberanian sipil, mahasiswa dibentuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan

bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Implementasi pendidikan anti korupsi yang komprehensif mencakup aspek kurikuler, kokurikuler, dan budaya kampus terbukti efektif dalam mentransformasi mahasiswa dari sekadar penerima pendidikan menjadi agen perubahan yang berintegritas. Hal ini sejalan dengan cita-cita demokrasi yang membutuhkan partisipasi aktif warga negara yang terdidik dan bermoral.

Sebagai rekomendasi, perguruan tinggi perlu: (1) memperkuat integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan; (2) menciptakan ekosistem kampus yang mencerminkan nilai-nilai integritas; (3) membangun kemitraan dengan KPK dan lembaga terkait untuk pengembangan materi dan metode pendidikan anti korupsi yang inovatif; serta (4) mengembangkan sistem penilaian yang mengukur tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik mahasiswa terkait nilai-nilai anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba.
The Civic Culture: Political Attitudes
and Democracy in Five Nations.

- Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Azra, Azyumardi. "Pendidikan, Korupsi, dan Pembangunan Masyarakat." *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 12, No. 27 (2013): 1–10.
- Budimansyah, Dasim dan Karim Suryadi. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi PKn SPS UPI, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Dewantara, Ki Hajar. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1977.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: The Free Press, 1916.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud, 2012.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. Terjemahan Myra Bergman Ramos. New York: Continuum, 2000.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
- Ki Hajar Dewantara. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1977.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Panduan Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: KPK RI, 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi 2022*. Jakarta: KPK RI, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Bandung: Mizan, 2000.
- Rosyada, Dede et al. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books, 1999.
- Suyatno. *Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Cara Mengatasinya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*.